

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai peranan yang sangat penting dalam sektor pertanian khususnya penyedia sumber pangan bagi masyarakat. Selain itu, juga dapat meningkatkan perekonomian nasional bahkan sebagai penghasil devisa negara pada saat hasil pertanian di ekspor ke negara-negara lain. Melihat pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia, maka pemerintah telah menetapkan bahwa pertanian dijadikan sebagai prioritas utama pembangunan dari masa ke masa. Dengan adanya pembangunan pertanian ini, apabila dikelola dengan baik dan bijak maka dapat meningkatkan pertumbuhan dan juga pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, sehingga mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran, yang pada akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga pada sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar filosofi pembangunan bangsa, sehingga warga negara

Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang pertanian (Nugroho & Tohari, 2020:1-2).

Program pembangunan pertanian dari pemerintah saat ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat petani dalam mengusahakan usaha tani mereka (Nugroho & Tohari, 2020). Program pembangunan pertanian ini berupaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha tani yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan pertanian jangka panjang yaitu sektor agribisnis sebagai andalan pembangunan nasional. Dengan keberadaan bantuan dari pemerintah ini, baik secara langsung seperti bimbingan dan pembinaan usaha maupun tidak langsung dalam bentuk insentif yang dapat mendorong petani untuk melindungi dan memperbaiki usaha tani mereka.

Kartu tani merupakan salah satu program pemerintahan terbaru dalam sektor pertanian yang lahir di era pemerintahan Jokowi Widodo dan Jusuf Kalla tepatnya pada tahun 2016. Program kartu tani ini dirancang oleh Kementerian Pertanian dan 4 Bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI dan BSI (Bank Syariah Indonesia). Hadirnya kartu tani ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan dapat membawa dampak yang positif bagi semua pihak. Tidak hanya bagi pemerintah tetapi yang paling penting adalah bermanfaat bagi para petani.

Kabupaten Dairi merupakan salah satu daerah yang telah menggunakan kartu tani, sebagai upaya untuk mengurangi ketidakteraturan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi (Sihite, 2021). Oleh karena itu untuk menghindari ketidakteraturan pendistribusian pupuk bersubsidi maka pemerintah Dairi telah menetapkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Dairi. Sejalan dengan strategi pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah dalam penyaluran pupuk bersubsidi, Kabupaten Dairi telah bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Pemerintah Dairi juga telah memanfaatkan sistem e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang dibuat oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan meminimalisir penyelewengan pupuk.

Program kartu tani diharapkan dapat membantu masyarakat mendapat kemudahan diantaranya, memperoleh kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian termasuk distribusi pupuk. Kemudian mendapatkan kemudahan akses dalam pembiayaan Bank BUMN melalui, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau. Selain itu juga, difasilitasi kemudahan sertifikasi tanah melalui skema Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dari Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Pemerintah Kabupaten Dairi telah melaksanakan sosialisasi penerapan kartu tani (Reza, 2019). Adanya sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat agar lebih memahami penggunaan program tersebut. Akan tetapi, meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi masih saja terdapat

beberapa kendala atau hambatan dari program kartu tani. Berdasarkan beberapa sumber di internet terkait dengan kartu tani terdapat 22 kelompok tani dari Desa Parbuluan I melakukan pengaduan ke DPRD di Dairi dikarenakan pupuk subsidi yang langka. Petani hanya menerima jatah pupuk 35 kilo per anggota kelompok dan jumlah yang tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (Sitanggang, 2021). Adapun persoalan kurangnya pupuk bersubsidi di Dairi dikarenakan jatah alokasi bersubsidi dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Dairi belum sesuai dengan yang diminta oleh pemerintah Kabupaten Dairi sehingga menyebabkan belum semua kebutuhan petani terhadap pupuk bisa terpenuhi (portal.dairikab.go.id, 2022).

Kartu tani juga dikatakan dapat memperlambat distribusi pupuk sehingga mengakibatkan pupuk langka (Dairinews.co, 2022). Penggunaan kartu tani memperlambat distribusi dikarenakan pembayaran menerapkan sistem non tunai atau dengan menggunakan kartu tani yang kemudian digesek pada mesin EDC (*elektronik data capture*) yang tersedia pada distributor pupuk. Tentunya, dalam transaksi menggunakan kartu tani diperlukan jaringan internet untuk keberhasilan transaksi. Sementara itu, penggunaan kartu tani di sebagian daerah masih belum dapat digunakan. Hal ini dikarenakan, terdapat beberapa daerah yang belum terjangkau atau terlayani internet sehingga menyebabkan tidak tersedianya mesin EDC dikios pupuk.

Layanan internet yang belum merata ini menyebabkan, penyaluran pupuk bersubsidi ini tidak dapat dirasakan oleh masyarakat petani yang berada di daerah tersebut. Sehingga untuk melakukan transaksi pupuk tersebut maka, mereka harus

melakukan transaksi yang jauh seperti pergi ke kota atau wilayah yang sudah terlayani internet. Menurut Usman Sihombing (Dairinews.co, 2022) banyak pengusaha kios pengecer sudah membayar namun pupuk tidak kunjung masuk. Hal tersebut menyebabkan langkanya pupuk subsidi dikios sehingga masyarakat terkadang mengalami keterlambatan pemupukan tanaman dan sebagian masyarakat terpaksa membeli pupuk non subsidi yang tentunya harganya lebih mahal dari pupuk subsidi.

Permasalahan kartu tani juga dapat ditemui pada saat masyarakat melakukan penebusan pupuk. Petani tidak mengetahui cara menggunakan kartu tani hal ini dikarenakan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan kartu tani. Melihat dari kondisi tersebut terdapat keterbatasan sumber daya dan kurangnya bimbingan dari pelaksana program untuk mensosialisasikan manfaat dan juga cara penggunaan kartu tani ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Efektivitas Program Kartu Tani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Desa Parbuluan III Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.”

1.2. Identifikasi Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini:

1. Bantuan Program Kartu Tani yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat petani.

2. Penyaluran pupuk yang belum tepat sasaran, kenaikan harga pupuk dan juga kelangkaan pupuk.
3. Minimnya pemahaman masyarakat petani dalam menggunakan kartu tani.
4. Efektivitas program kartu tani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Desa Parbuluan Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka akan dilakukan pembatasan masalah yang diteliti. Maka, dalam penelitian ini menetapkan dua batasan masalah yakni:

1. Efektivitas program kartu tani di Desa Parbuluan Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.
2. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas kartu tani di Desa Parbuluan III, Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.
3. Program kartu tani terhadap kesejahteraan masyarakat petani di Desa Parbuluan III Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

1.4. Rumusan Masalah

Setelah dilakukannya pembatasan masalah maka peneliti merangkum secara sederhana rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program kartu tani di Desa Parbuluan III, Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas program kartu tani di Desa Parbuluan III Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?
3. Bagaimana program kartu tani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Desa Parbuluan III Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas program kartu tani di Desa Parbuluan III, Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas program kartu tani di Desa Parbuluan III, Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.
3. Untuk mengetahui bagaimana program kartu tani dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Desa Parbuluan III Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan bagi pengembangan konsep dan teori, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini mampu menyumbangkan dan mengembangkan dalam kajian program kartu tani dan sekaligus dapat memperkaya keilmuan khususnya dalam bidang ilmu sosial dan hukum. Penelitian ini juga bermanfaat bagi seluruh civitas akademik dilingkungan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berharga kepada Lembaga pemerintahan Kabupaten Dairi, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan program kartu tani.
3. Mengetahui tingkat efektivitas program kartu tani dan hambatan-hambatan program kartu tani di Desa Parbuluan Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.
4. Menjadi referensi serta memberikan pengalaman langsung kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai program kartu tani.

